



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

# **PERAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH PRIORITAS**

**RAPAT KOORDINASI NASIONAL TKPK 2014  
JAKARTA, 13 MEI 2014**

**BAMBANG WIDIANTO**

Deputi Seswapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/  
Sekretaris Eksekutif TNP2K

## TIGA TANTANGAN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

# MISKIN – RENTAN – TIMPANG

### KEMISKINAN

- Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terus berkurang: 28,6 juta orang (September 2012).
- Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya.

### KERENTANAN

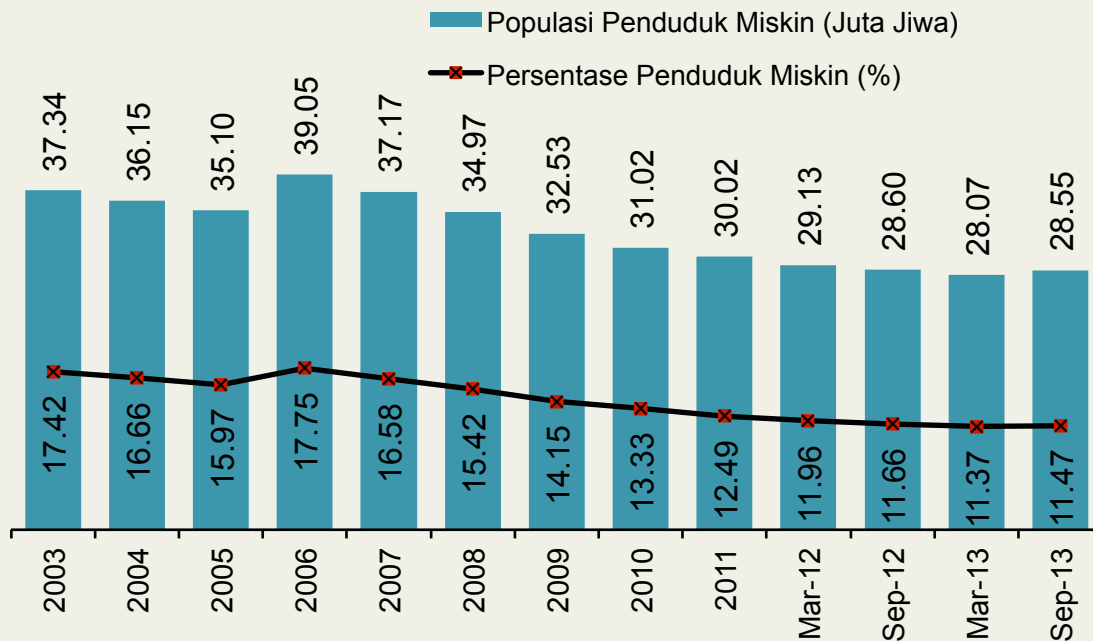
- Sebagian kelompok di atas GK sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan.
- Namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia.

### KESENJANGAN

- Rasio Gini sebesar 0,41 (2013), dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.
- Perlu intervensi yang berbeda antar kelompok pendapatan.

# KEMISKINAN

- Dalam konteks *year-on-year* (Maret ke Maret atau September ke September) terjadi **penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan**
- Namun, penurunan kemiskinan ini **makin lama makin lambat**



Sumber: BPS

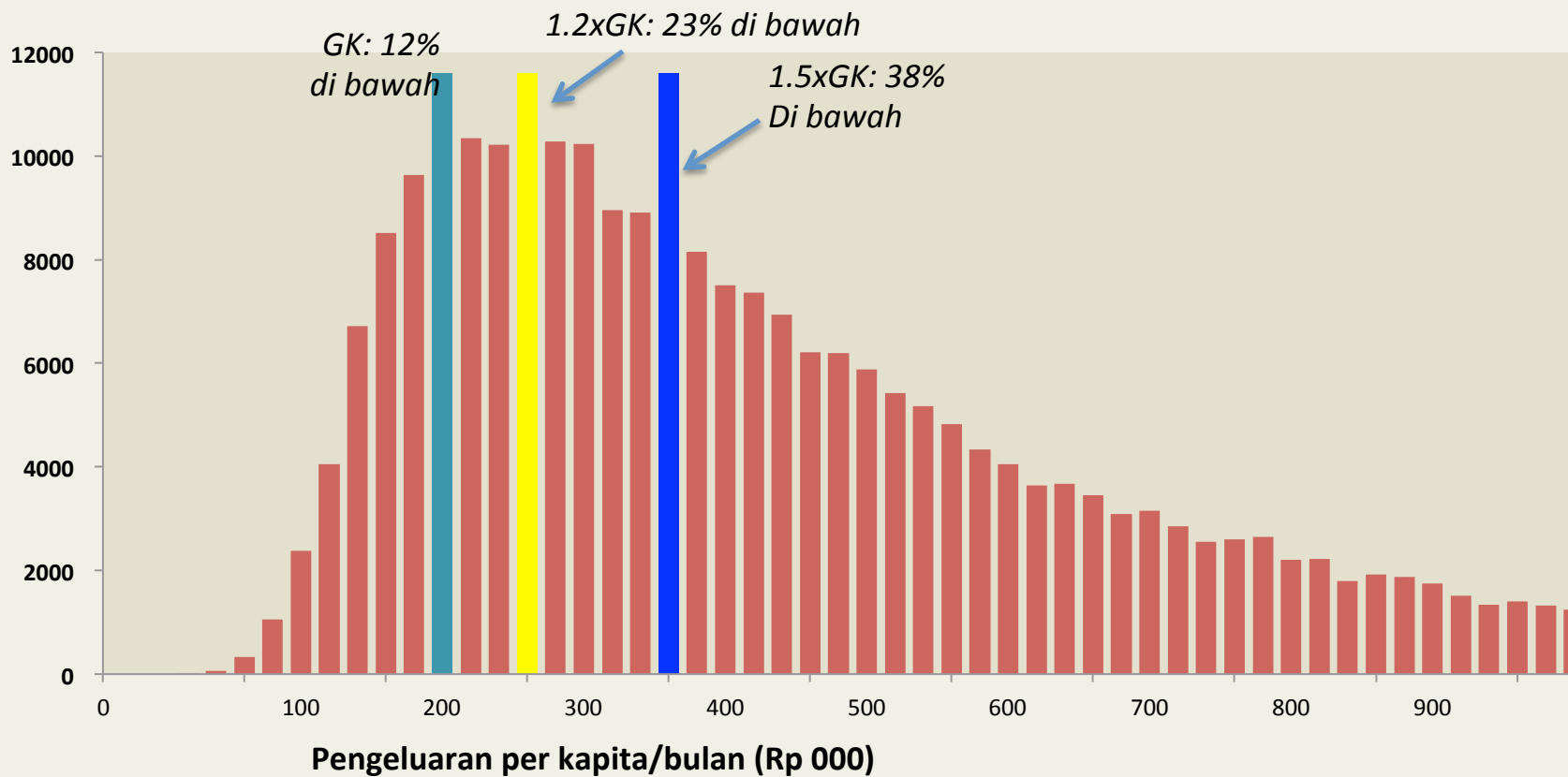
	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	Perubahan Angka Kemiskinan (persentase)
Maret '12 – Maret '13	-1.06	-0.58
Sept '12 – Sept '13	-0.05	-0.19



# KERENTANAN

## Distribusi Pengeluaran/Kapita, 2012

Orang ('000)

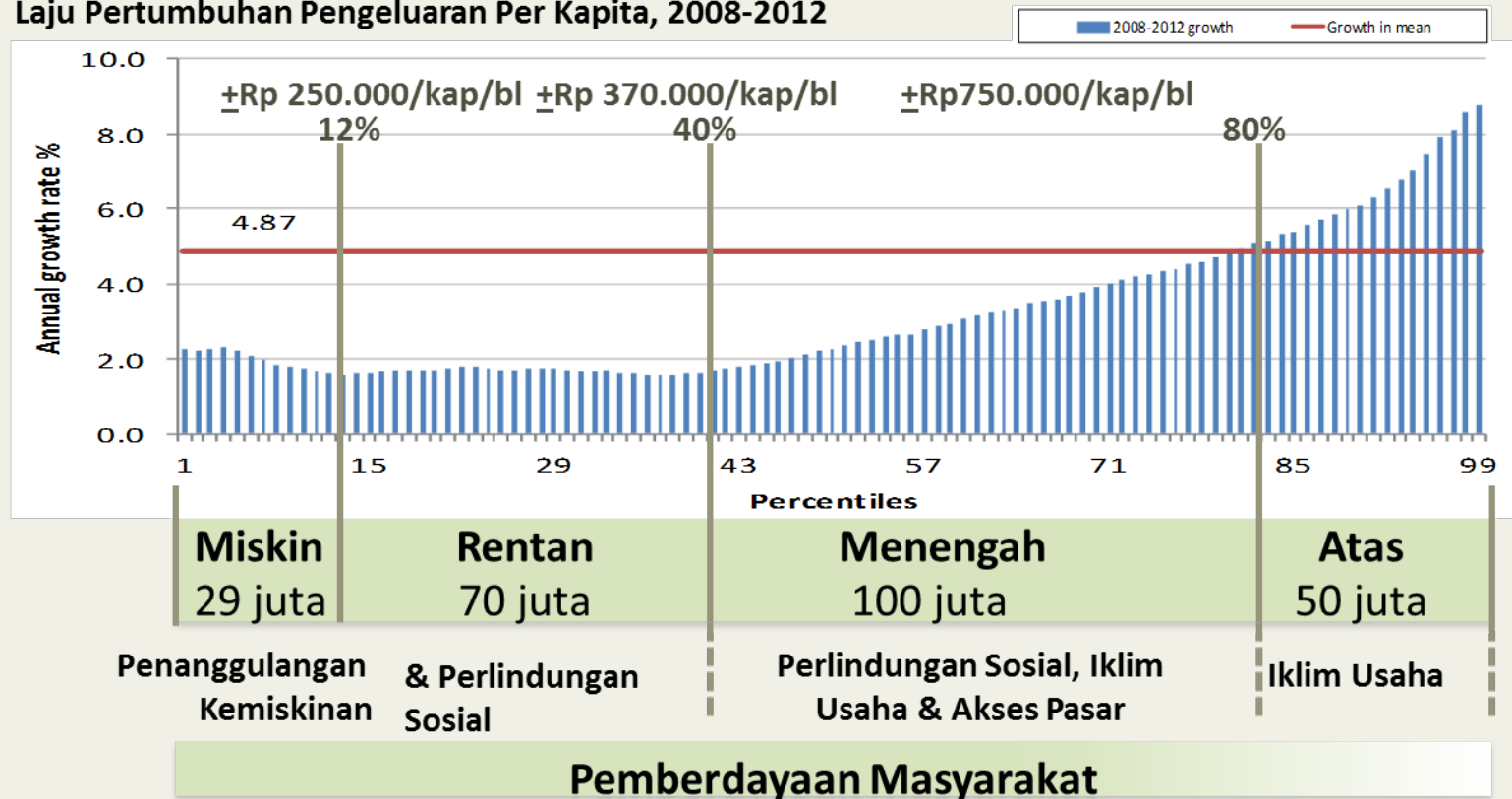


Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia

# KESENJANGAN

- Laju pertumbuhan pendapatan (kemampuan ekonomi) kelompok penduduk 40% terbawah cenderung kecil, sekitar 2% per tahun.
- Setiap kelompok butuh intervensi kebijakan yang berbeda.

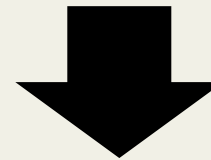
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012



# KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1	2	3	4
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Meningkatkan peran serta komunitas	Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja	Meningkatkan daya dukung kegiatan ekonomi



## PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Klaster	Klaster	Klaster	Klaster
1	2	3	4
Bantuan sosial berbasis individu, rumah tangga atau keluarga	Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat	Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil	Program Pro-Rakyat lainnya

# UPAYA KHUSUS

Penguatan  
Pengendalian  
Program  
Bersasaran

- Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT)
- Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
- Pelaksanaan Muskel/Musdes

Pemantapan  
Penargetan  
Wilayah  
Prioritas

- Pemantapan pemantauan pelaksanaan program bersasaran di wilayah prioritas
- Pemanfaatan Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW) berbasis kemiskinan multidimensi dalam perencanaan lokus program

# PRIORITAS JANGKA PENDEK-MENENGAH TNP2K

1. Unifikasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional
2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin.
3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan.
4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM.
5. Mengembangkan Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif untuk Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan.



# DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK

**Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010** tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15)

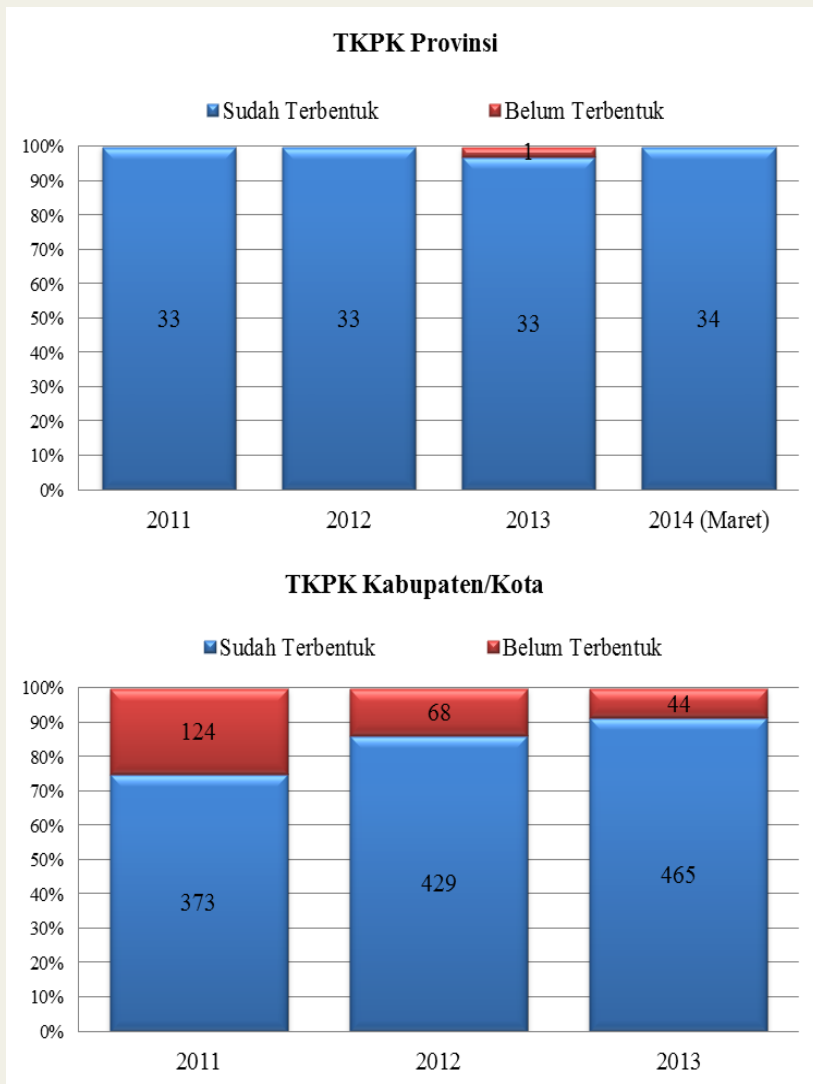
**Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010** tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
- Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

# TUGAS TKPK



**TNP2K mendukung peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (melalui Pelatihan, Magang dan Konsultasi)**

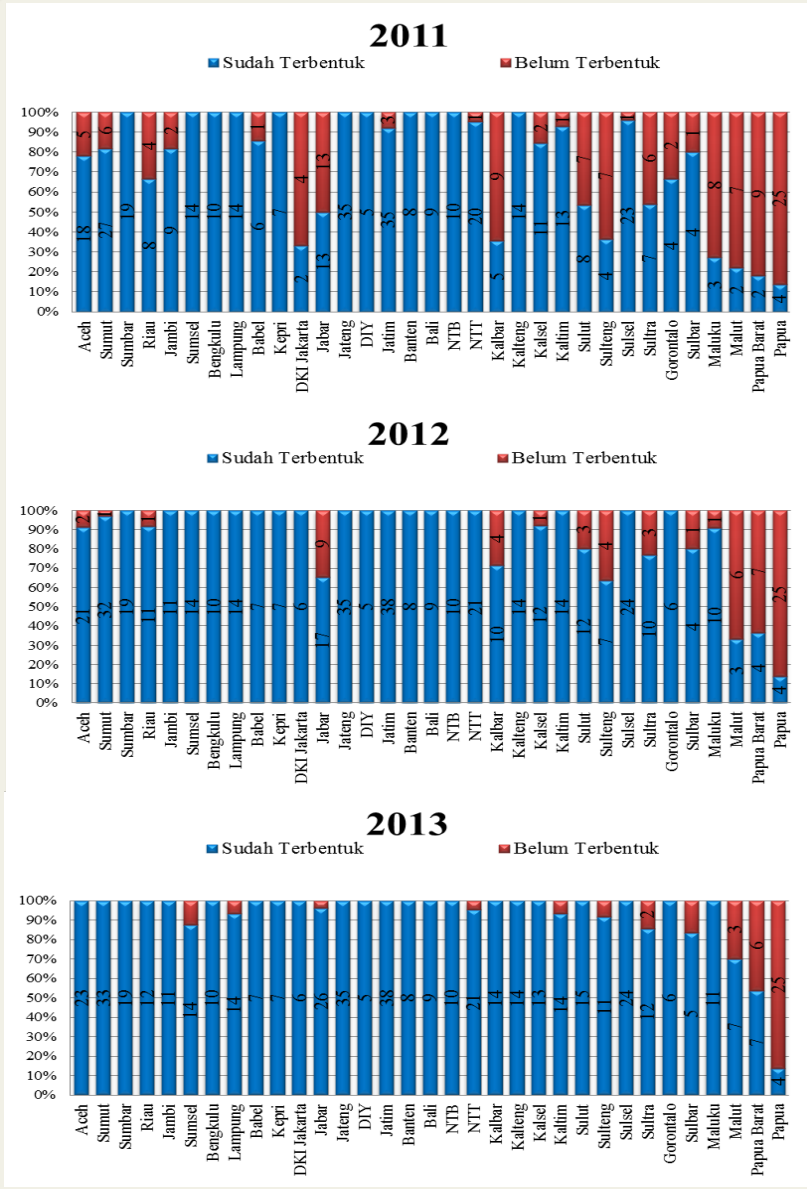


## FORMALISASI PEMBENTUKAN TKPK (1)

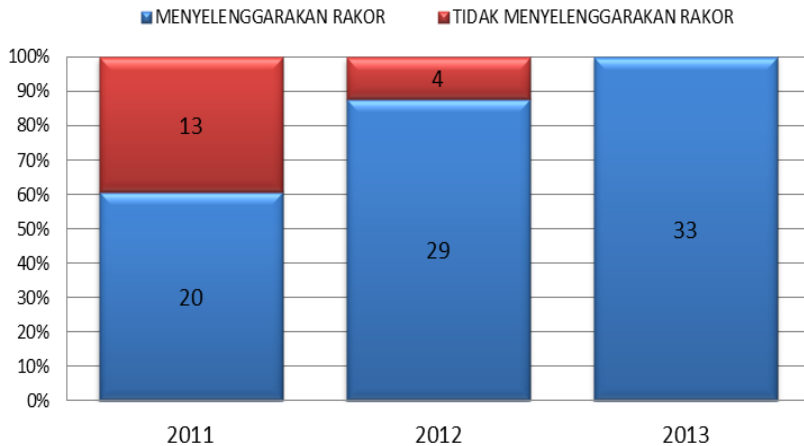
- (Mar 2014): TKPK sudah terbentuk di **34 Provinsi (100 %)**
- (Des 2013): TKPK sudah terbentuk di **465 Kab/ Kota (91,4 %)**

# FORMALISASI PEMBENTUKAN TKPK (2)

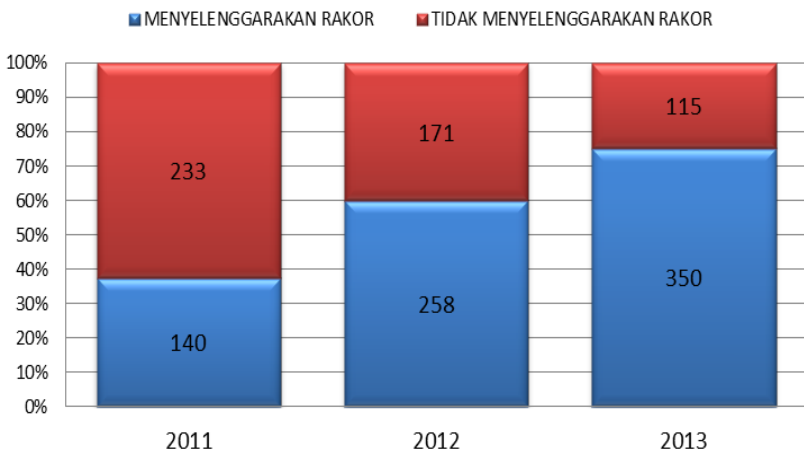
- Sisa daerah yang belum membentuk TKPK umumnya berada di wilayah timur Indonesia, khususnya di **Maluku Utara, Papua Barat dan Papua**; dan daerah baru hasil pemekaran
- **11** dari **100** daerah prioritas belum membentuk TKPK



### TKPK Provinsi



### TKPK Kabupaten/Kota



## PELAKSANAAN RAKOR OLEH TKPK (1)

(2013)

- 100% TKPK Provinsi dan 75% TKPK Kab/Kota melaksanakan Rakor
- Dari TKPK yang melaksanakan Rakor, 60% diantaranya dengan frekuensi minimal 3 kali setahun
- **71 dari 89** Daerah Prioritas yang memiliki TKPK telah melaksanakan Rakor

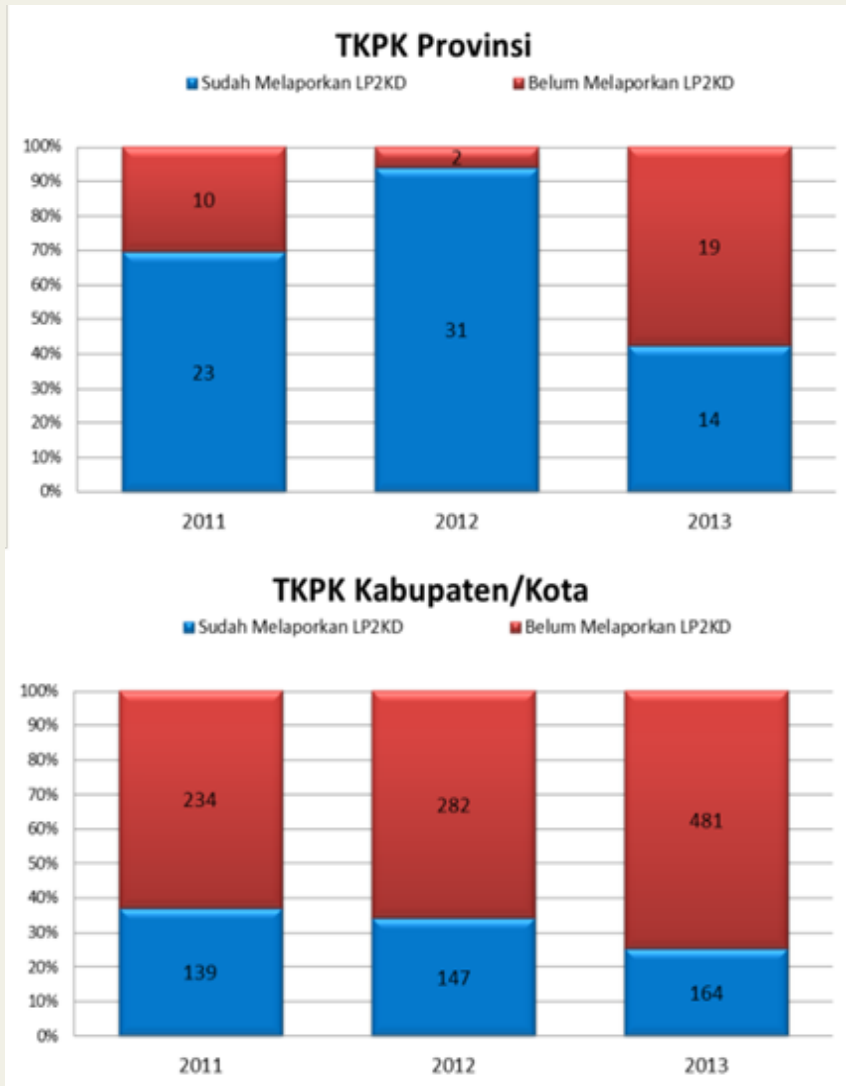
**(2013)**

	Dihadiri oleh hanya unsur TKPK	Dihadiri oleh unsur TKPK dan pemangku kepentingan lain
Dipimpin Wakil Kepala Daerah	27,7 %	42,5 %
Dipimpin oleh Pejabat di bawah Wakil Kepala Daerah	20,1 %	9,7 %

## PELAKSANAAN RAKOR OLEH TKPK (2)

- Mayoritas Rakor TKPK (70 %) dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Daerah selaku Ketua TKPK
- Banyak Rakor TKPK (52%) yang juga melibatkan pemangku kepentingan di luar struktur TKPK (DPRD, Camat, Kades/Lurah, LSM, Media Massa, Dunia Usaha, Perbankan, Tokoh Masyarakat dll.)

## PELAPORAN LP2KD



- Jumlah TKPK yang mampu menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) terus meningkat.
- Tetapi ada masalah keterlambatan karena kesulitan utama menyangkut ketersediaan data untuk analisis
- **Hanya 6 dari 89** Daerah Prioritas yang memiliki TKPK telah menyelesaikan **LP2KD Tahun 2013**

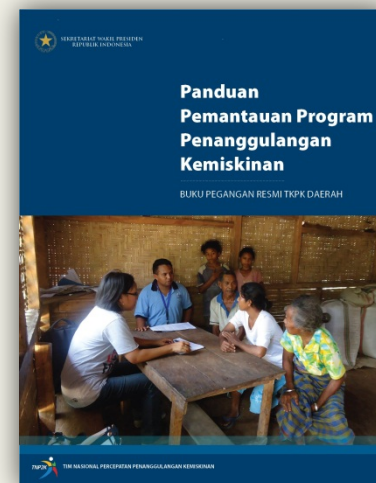
# HARAPAN KEPADA TKPK

1. TKPK mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang dapat menghasilkan APBD yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan.
2. TKPK mampu melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
4. Mengoordinasikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan



# TUGAS TIM TEKNIS TKPK

1. Melakukan analisis kondisi kemiskinan multidimensi di daerah masing-masing
2. Menetapkan prioritas sebagai dasar intervensi kebijakan
3. Memfasilitasi agar intervensi kebijakan prioritas tercermin dalam anggaran
4. Memantau pelaksanaan program-program peanggulangan kemiskinan



# DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN DARI PEMERINTAH DAERAH

1. Memastikan penggunaan KPS untuk mengakses Raskin dan BSM dalam rangka memperbaiki ketepatan sasaran
2. Menyediakan anggaran pendukung untuk menyediakan biaya penyaluran beras dari titik distribusi ke titik bagi
3. Memastikan PKH dijalankan sesuai dengan ketentuan
4. Memastikan JKN diterima bagi masyarakat yang berhak
5. Melakukan pemutakhiran data RT/Keluarga/Individu penerima manfaat program sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing program
6. Melakukan sosialisasi dan pemantauan serta menangani pengaduan secara intensif
7. Mengalokasikan anggaran untuk koordinasi TKPK



**TERIMA KASIH**